

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia masih belum terlepas dari kasus korupsi, berbagai kasus penyelewengan dana masih terjadi di Indonesia. Menurut Emerson Yuntho, Wakil Koordinator *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dalam artikel website Republikan menuliskan bahwa peringkat Indonesia untuk negara terbersih dari korupsi di dunia tahun 2012 berada pada posisi 118, lalu pada tahun 2013 di peringkat 114, dan tahun 2014 berada di peringkat 107. Memang mengalami peningkatan namun belum dapat dibanggakan karena masih menempati posisi bawah (8 Desember 2014, [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)).

Data dari *Corruption Perceptions Index* (CPI) turut mendukung peringkat korupsi Indonesia yang masih mengkhawatirkan. Dalam artikel website SwaraNews berjudul “Indeks Korupsi Indonesia Berada di Peringkat 107 dari 175 Negara” pada tanggal 9 Desember 2014 mengungkapkan, data CPI pada tahun 2014 yang dirilis *Transparency International Indonesia* menunjukkan bahwa angka indeks untuk Indonesia adalah 34, dengan keterangan angka indeks 0 berarti negara paling korupsi dan angka indeks 100 berarti negara paling bersih dari korupsi (9 Desember 2014, [www.swaranews.com](http://www.swaranews.com)).

Dengan angka indeks yang hanya mencapai 34 wajar peringkat Indonesia masih jauh untuk mencapai negara bersih korupsi. Itu artinya, kasus korupsi di Indonesia masih menjadi masalah yang sulit untuk diatasi dan perlu usaha yang lebih keras.

Bahkan korupsi di Indonesia telah melibatkan dunia pendidikan. Bukti konkretnya yaitu tiga tahun berturut-turut perguruan tinggi di Indonesia terlibat kasus korupsi. Pada tahun 2012, dalam artikel website Merdeka, menuliskan bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait dugaan korupsi di 16 perguruan tinggi, menyatakan adanya indikasi kerjasama dalam permainan anggaran antara Kementerian Pendidikan Nasional, perusahaan

Muhammad Nazaruddin (PT Anugrah Nusantara), dan anggota DPR. (29 Agustus 2012, [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com))

Artikel dalam harian website Jaya Pos dengan judul “Korupsi Menggila di Perguruan Tinggi” pada tanggal 3 November 2012, menambahkan bahwa permainan anggaran proyek pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBD) tersebut mengakibatkan kerugian negara kurang lebih Rp 200 miliar dengan melibatkan 16 perguruan tinggi (3 November 2012, [www.harianjayapos.com](http://www.harianjayapos.com)). Rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Daftar perguruan Tinggi yang Terlibat Kasus Korupsi Dana APBD  
Tahun 2013**

NO	PERGURUAN TINGGI	KERUGIAN NEGARA (Rp)
1	Universitas Sumatera Utara	30.000.000.000
2	Universitas Negeri Malang	40.000.000.000
3	Universitas Brawijaya	30.000.000.000
4	Universitas Udayana	30.000.000.000
5	Universitas Negeri Jambi	30.000.000.000
6	Universitas Negeri Jakarta	45.000.000.000
7	ITS Surabaya Robotika	40.000.000.000
	ITS Surabaya Forensik	15.000.000.000
8	Universitas Sudirman	30.000.000.000
9	Universitas Sriwijaya	30.000.000.000
10	Universitas Papua	30.000.000.000
11	Universitas 11 Maret	40.000.000.000
12	Universitas Tirtayasa	50.000.000.000
13	Institut Pertanian Bogor	40.000.000.000
14	Universitas Tadulako	30.000.000.000
15	Universitas Cendana	20.000.000.000
16	Universitas Patimura	35.000.000.000

Sumber: [www.harianjayapos.com](http://www.harianjayapos.com)

**Megha Andalawestyas, 2014**  
**PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS**  
**LAPORAN KEUANGAN PADA PERGURUAN TINGGI: (Survey Perguruan Tinggi di Jawa Barat yang**  
**Terdaftar pada BAN-PT)**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

Kemudian pada tahun 2013, kasus korupsi yang melibatkan perguruan tinggi terjadi kembali, bahkan perguruan tinggi tersebut adalah perguruan tinggi ternama di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia (UI). Artikel berjudul “Korupsi Perpustakaan, Direktur Keuangan UI ke KPK” dalam harian Tempo memaparkan kasus tersebut bahwa mulanya hal itu terjadi saat mengadakan proyek instalasi IT perpustakaan pada tahun 2010-2011 dengan anggaran Rp 21 miliar. Kemudian, KPK menemukan penyalahgunaan dana di baliknya. Terdapat seorang wakil rektor yang dinyatakan sebagai tersangka pada kasus tersebut yaitu Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Administrasi Umum Universitas Indonesia, Tafsir Nurchamid. (17 September 2013, [m.tempo.co](http://m.tempo.co))

Lalu pada tahun 2014, kasus korupsi yang kembali melibatkan perguruan tinggi ternama lainnya di Indonesia yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM), perguruan tinggi yang sudah tua dan besar di Yogyakarta, terlibat dalam kasus korupsi yang terpampang dalam artikel website Detik News berjudul “4 Dosen UGM Jadi Tersangka, Pukat Minta UGM Tidak Tutupi Kasus Korupsi” , dengan isi berita tentang pengungkapan Hasrul Haili, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada bahwa banyak aset terutama tanah yang dimiliki UGM belum terdata dengan baik sehingga berpotensi hilang atau diselewengkan dan kemungkinan hal tersebut bukan menjadi kasus satu-satunya di UGM. (18 Juni 2014, [www.detiknews.com](http://www.detiknews.com))

Disamping itu, terdapat informasi yang bertentangan dengan kasus di perguruan tinggi yang terjerat kasus korupsi. Sebagai contoh adalah UGM dan UI yang memiliki kasus korupsi pada tahun 2013 dan 2014 lalu. Dalam artikel yang berjudul “UGM Raih Predikat WTP 7 Kali Berturut-turut” di website UGM, menyatakan bahwa keberhasilan UGM mendapatkan opini WTP sejak 2007 lalu ini karena pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara tertib, efisien, transparan dan sesuai aturan yang berlaku. (29 Juli 2013, [www.ugm.ac.id](http://www.ugm.ac.id)). Dan Universitas Indonesia pun meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan laporan audit dalam laporan keuangan per 31 Desember 2011. ([www.ui.ac.id](http://www.ui.ac.id)). WTP adalah salah satu dari lima opini audit dengan tingkat tertinggi yang berarti laporan keuangan yang disajikan tidak memiliki kesalahan material dan sesuai

dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). (Sukrisno:2012). Melihat hal tersebut, UGM dan UI memiliki catatan yang baik dalam pelaporan keuangan. Bahkan dengan opini WTP, berdasarkan pengertiannya, sudah seharusnya tidak lagi ditemukan salah saji dan temuan-temuan ganjil lainnya pada pelaporan keuangan.

Namun, pernyataan dari Eddy Mulyadi, Deputy Kepala Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menyangkal bahwa laporan keuangan beropini WTP sudah pasti bebas dan bersih dari korupsi. Beliau menyampaikan pendapatnya pada artikel dalam website Aktual bahwa pernyataan tentang opini yang menyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah bebas dari korupsi adalah sangat salah karena belum tentu laporan keuangan yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu tidak tersangkut dengan perbuatan korupsi. (15 November, 2015, [www.aktual.co](http://www.aktual.co)).

Dengan keadaan seperti itu, maka bagaimana korupsi banyak terjadi di perguruan tinggi seperti beberapa kasus yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini menimbulkan tanda tanya besar tentang bagaimana dan seberapa besar pengaruh pengendalian internal yang dilaksanakan oleh pihak internal perguruan tinggi terhadap laporan keuangan yang dihasilkan hingga terjadi kasus korupsi di banyak perguruan tinggi. Apakah tidak berjalan secara efektif pengendalian internal yang telah diterapkan oleh perguruan tinggi. Karena menurut Arens (2012), salah satu tujuan umum pengendalian internal adalah reliabilitas laporan keuangan.

Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan survey pada perguruan tinggi yang terdaftar di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Terdapat 230 institusi perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang terdaftar pada BAN-PT. Provinsi Jawa Barat memiliki perguruan tinggi terbanyak yang terdaftar pada BAN-PT yaitu sebanyak 21 perguruan tinggi. ([www.ban-pt.kemendiknas.go.id](http://www.ban-pt.kemendiknas.go.id))

Alasan yang mendasari hal tersebut adalah karena dalam Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) Buku II tentang Standar dan Prosedur memiliki tujuan untuk perguruan tinggi yang terdaftar dalam BAN-PT yaitu memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu

yang telah ditetapkan oleh BAN-PT, mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi, dan hasil akreditasi yang didapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, alokasi dana, dan pengakuan dari badan atau institusi yang berkepentingan.

Standar yang dimaksud dalam tujuan BAN-PT tersebut memiliki tujuh macam standar. Dalam standar dua tentang Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu memiliki elemen penilaian bahwa perguruan tinggi harus mempunyai sistem-sistem pengelolaan yang baik sehingga menghasilkan keefektifan semua fungsi dan operasi manajemen di semua tingkat unit kerja perguruan tinggi. Salah satu sistemnya yaitu harus memiliki sistem audit internal yang efektif, menggunakan kriteria dan instrument untuk mengukur kinerja setiap unit. Kemudian adanya monitoring dan evaluasi hasil penjaminan mutu minimal di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, asset, sarana prasarana, keuangan, dan manajemen.

Standar berikutnya yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah standar enam tentang Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem informasi. Dalam standar tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan pembiayaan dalam perguruan tinggi harus meliputi perencanaan kebutuhan, pembukuan penerimaan dan pengelolaan dana, serta monitoring dan evaluasi dilakukan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan. Elemen penilaian yang digarisbawahi dalam standar ini adalah terkait proses pengelolaan dana institusi perguruan tinggi, realisasi penerimaan dana dari berbagai sumber, sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal, audit keuangan yang transparan dan diakses oleh semua pemangku kepentingan, serta terkait akseibilitas data.

Jadi, perguruan tinggi yang telah terdaftar dalam BAN-PT seharusnya telah memenuhi semua standar yang telah ditentukan oleh BAN-PT. Melihat standar dua dan standar enam memiliki arti bahwa perguruan tinggi yang terdaftar dalam BAN-PT seharusnya telah memiliki kontrol dalam pengawasan internal dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar karena selalu dinilai oleh BAN-PT.

**Megha Andalawestyas, 2014**

***PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PERGURUAN TINGGI: (Survey Perguruan Tinggi di Jawa Barat yang Terdaftar pada BAN-PT)***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Fahni Wahyuni dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2015) berkesimpulan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Deni Ahmad Kurniadi berjudul Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi Pada BLU Terintegrasi Pusat di Kota Bandung) menyatakan bahwa Pengendalian internal berhubungan terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 74,1%. Dan Dessy Natalia dengan penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung dengan penelitian dilakukan pada Badan Pengawas Internal Inspektorat dan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat (2012) menyatakan bahwa pengaruh pengendalian internal pada kualitas laporan keuangan hanya sebesar 18,06%. Lalu terdapat penelitian juga yang menilai dari arah hubungannya seperti yang dilakukan oleh Tuti Herawati dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur) dan Ruri Windiastuti dengan judul Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung). Hasil penelitian keduanya mengatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Namun terdapat penelitian yang memiliki perbedaan hasil yaitu penelitian dari Reza Ali Akbar dengan judul penelitian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menghasilkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Dapat disimpulkan dari beberapa penelitian sebelumnya bahwa hasil penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan belum konsisten dan juga presentase pengaruh yang tidak stabil tinggi rendahnya dari penelitian yang menyatakan bahwa sistem pengendalian

internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, penulis bermaksud untuk mengaplikasikan penelitian sebelumnya sebagai dasar untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Perguruan Tinggi yang terdaftar pada BAN-PT.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas maka penulis mengambil judul untuk penelitian yang akan dilakukan adalah **PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PERGURUAN TINGGI (Survey Perguruan Tinggi di Jawa Barat yang Terdaftar pada BAN-PT)**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana gambaran implementasi sistem pengendalian internal pada perguruan tinggi di Jawa Barat yang terdaftar pada BAN-PT?
2. Bagaimana gambaran kualitas laporan keuangan pada perguruan tinggi di Jawa Barat yang terdaftar pada BAN-PT?
3. Bagaimana pengaruh implementasi sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada perguruan tinggi di Jawa Barat yang terdaftar pada BAN-PT?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran tentang implementasi sistem pengendalian internal pada perguruan tinggi di Jawa Barat yang terdaftar pada BAN-PT.
2. Untuk mengetahui gambaran tentang kualitas laporan keuangan pada perguruan tinggi di Jawa Barat yang terdaftar pada BAN-PT.
3. Untuk mengetahui pengaruh implementasi sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada perguruan tinggi di Jawa Barat yang terdaftar pada BAN-PT.

## **1.4. Manfaat**

**Megha Andalawestyas, 2014**

***PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PERGURUAN TINGGI: (Survey Perguruan Tinggi di Jawa Barat yang Terdaftar pada BAN-PT)***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk berbagai pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis dilapangan.

#### 1. Manfaat Teoritis

Dari aspek akademis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi salah satu sumbangan keilmuan di bidang sistem informasi akuntansi.

#### 2. Manfaat Praktek

- 1) Bagi Peneliti, bermanfaat untuk menambah pengetahuan dalam bidang sistem akuntansi terutama pada sistem pengendalian internal dalam menunjang laporan keuangan yang berkualitas.
- 2) Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak perguruan tinggi, khususnya bagi manajemen pada perguruan tinggi mengenai gambaran dalam penerapan sistem pengendalian internal demi tercapainya laporan keuangan yang berkualitas.
- 3) Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya terkait dengan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada perguruan tinggi.